



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

PEMANFAATAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme dan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa seluruh Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tanah Laut sudah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 23

- Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umumdan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Pejabat Teknis BLUD Puskesmas adalah Koordinator pelayanan kesehatan yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.

9. Pendapatan BLUD adalah semua bentuk penerimaan BLUD yang berasal dari beberapa sumber.
10. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
11. Remunerasi adalah imbalan yang diberikan atas kinerja.
12. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, standar pelayanan minimal, target, dan anggaran BLUD.
13. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
14. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran–Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial.
17. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
18. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FTKP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
19. Jasa Layanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga-tenaga kesehatan dan tenaga administrasi kepada pasien atau masyarakat.
20. Hibah adalah pemberian barang atau jasa yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PENDAPATAN BLUD

Pasal 2

Pendapatan BLUD yang dimaksud bersumber dari:

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah;
- c. APBD;
- d. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 3

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola langsung untuk membiayai belanja UPT Puskesmas sesuai RBA.
- (2) Dalam hal tertentu pendapatan BLUD dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja UPT Puskesmas tanpa melakukan perubahan RBA.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu mendapat persetujuan Pimpinan BLUD.

BAB III
REMUNERASI

Bagian Kesatu
Jasa Layanan

Pasal 4

Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. Dana Kapitasi BPJS Kesehatan;
- b. Dana Non Kapitasi BPJS Kesehatan; dan
- c. Jasa Layanan lainnya sesuai tarif pelayanan kesehatan BLUD.

Paragraf 1
Dana Kapitasi

Pasal 5

Dana Kapitasi BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dimanfaatkan untuk:

- a. pembayaran jasa layanan kesehatan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 6

- (1) Pembayaran jasa layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dibagikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (2) Pembagian jasa layanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
 - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
 - b. kehadiran;
 - c. masa kerja; dan
 - d. tanggung jawab program.

- (3) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dinilai sebagai berikut:
- tenaga medis diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan dan kebidanan diberi nilai 100 (seratus);
 - tenaga kesehatan setara S2 diberi nilai 90 (sembilan puluh);
 - tenaga kesehatan setara D4 diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - tenaga kesehatan D3 diberi nilai 60 (enam puluh);
 - tenaga non kesehatan S1 diberi nilai 50 (lima Puluh);
 - tenaga non kesehatan D3, atau asisten tenaga kesehatan diberi nilai 40 (empat puluh); dan
 - tenaga non kesehatan di bawah D3 diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (4) Dalam hal tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merangkap tugas administratif sebagai:
- Pimpinan BLUD diberi nilai 100 (seratus);
 - Pejabat Keuangan/Kasubbag Tata Usaha diberi nilai 70 (tujuh puluh);
 - Pejabat Teknis diberi nilai 10 (sepuluh);
 - Bendahara Pengeluaran BLUD diberi nilai 55 (lima puluh lima);
 - Bendahara Penerimaan BLUD diberi nilai 40 (empat puluh);
 - Pengurus Barang Pembantu diberi nilai 20 (dua puluh); dan
 - Tenaga Kesehatan yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP) atau Surat Ijin Kerja (SIK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan poin sesuai dengan variable jenis ketenagaan pada ayat (3) huruf g.
- (5) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai sebagai berikut:
- hadir setiap hari kerja diberi nilai 1 (satu) poin perhari;
 - tidak hadir apel pagi atau siang 7 (tujuh) kali atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin;
 - ketidakhadiran karena sakit paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dengan dibuktikan surat keterangan dari dokter;
 - penugasan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tugas pokok fungsinya, diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf (a); dan
 - izin belajar atau pelatihan tetap dianggap hadir.
- (6) Variabel masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dinilai sebagai berikut:
- 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberi nilai 5 (lima);
 - 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberi nilai 10 (sepuluh);
 - 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberi nilai 15 (lima belas);

- d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun diberi nilai 20 (dua puluh); dan
 - e. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (7) Variabel tanggung jawab program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada petugas yang merangkap sebagai penanggung jawab program atau setara diberi nilai tambahan 10 (sepuluh), apabila ada tambahan program diberi nilai tambahan 5 (lima).
- (8) Jumlah jasa layanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pemanfaatan dukungan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dengan rincian sebagai berikut:

- a. belanja barang dan jasa;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja Pegawai.

Pasal 8

Penetapan rincian dan besaran pemanfaatan dukungan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Paragraf 2 Dana Non Kapitasi

Pasal 9

- (1) Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dibayarkan oleh BPJS Kesehatan atas permintaan dana yang diusulkan oleh UPT Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan.
- (2) Jenis layanan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan dana non kapitasi yaitu untuk dukungan biaya operasional BLUD dan/atau jasa pelayanan. Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan non kesehatan dihitung dengan menggunakan poin-poin sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Jasa Layanan Sesuai Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD

Pasal 10

Pendapatan dari jasa layanan sesuai tarif pelayanan kesehatan BLUD dimanfaatkan untuk dukungan biaya operasional BLUD dan/atau jasa pelayanan. Jasa pelayanan yang diterima oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan BLUD dihitung dengan menggunakan poin-poin sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Hibah

Pasal 11

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat berupa hibah terikat dan tidak terikat, diperoleh dari masyarakat dan/atau badan lain.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara langsung sesuai kebutuhan BLUD.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penggunaan pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pimpinan BLUD.

Bagian Ketiga
APBD

Pasal 12

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berupa pendapatan yang berasal dari DPA SKPD.
- (2) Penggunaan Pendapatan BLUD yang bersumber dari SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain

Pasal 13

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD dengan syarat terdapat naskah Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dengan tujuan kerja sama sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam hal tidak tercantum dalam perjanjian kerja sama, penggunaan dapat dilakukan secara langsung sesuai kebutuhan BLUD.
- (4) Penggunaan pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pimpinan BLUD.

Bagian Kelima
Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah

Pasal 14

Pendapatan BLUD yang bersumber dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:

- a. jasa giro;
- b. pendapatan bunga;
- c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
- d. investasi;
- e. pengembangan usaha;
- f. praktik pendidikan kesehatan; dan
- g. pendapatan BLUD yang sah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pendapatan BLUD yang diterima dan belum digunakan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini pemanfaatannya berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 131 Tahun 2022 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Peraturan Bupati ini berlaku sejak ditetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 131 tahun 2022 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 131) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Maret 2023

BUPATI TANAH LAUT

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 38

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 38 TAHUN 2023
TANGGAL : 20 MARET 2023

FORMULA PERHITUNGAN JASA PELAYANAN DANA KAPITASI

Persentase Kehadiran

X

Jenis Ketenagaan

+

Masa Kerja

+

Rangkap Tugas Administrasi

+

Tanggung jawab program

}

X

Jumlah Dana Jaspel

Total Jumlah Seluruh Poin

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 38 TAHUN 2023
 TANGGAL : 20 MARET 2023

RINCIAN PERHITUNGAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI

Rincian Penggunaan dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Kebidanan (Persalinan, ANC, PNC, Pelayanan prarujukan pada komplikasi kebidanan dan atau neonatal), Pelayanan KB.

a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 80% (Delapan puluh persen)

a) Bidan Pelaksana Pelayanan	:	78%
b) Dokter Penanggung Jawab	:	3%
c) Penanggung Jawab Kesga	:	1 %
d) Non Medis dan Non Perawatan	:	5%
(1) Loker	:	1%
(2) Farmasi	:	1%
(3) CS	:	1%
(4) Laboratorium	:	1%
(5) Administrasi	:	1%
e) Tim BLUD	:	11%
(1) Pimpinan BLUD	:	4%
(2) Pejabat Keuangan	:	3%
(3) Bendahara Penerimaan	:	1%
(4) Bendahara Pengeluaran	:	2%
(5) Pengelola Sarana Prasarana	:	1%
f) P-care	:	2%

b. Operasional sebesar 20% (dua puluh persen).

1. Kegiatan edukasi kesehatan prolanis dan aktivitas fisik prolanis dibayarkan 100 % kepada pelaksana dan penyedia sesuai ketentuan pada perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan

2. Pelayanan Rawat Inap

a. Jasa layanan kesehatan sebesar 80% (delapan puluh persen)

a) Perawat Pelaksana Pelayanan	:	54%
b) Dokter Penanggung Jawab	:	20%
c) Penanggung Jawab Rawat Inap	:	4 %
d) Non Medis dan Non Perawatan	:	6%
(1) Loker	:	1%
(2) Farmasi	:	1%
(3) CS	:	1%
(4) Laboratorium	:	1%
(5) Administrasi	:	2%
e) Tim BLUD	:	14%
(1) Pimpinan BLUD	:	5%
(2) Pejabat Keuangan	:	4%
(3) Bendahara Penerimaan	:	2%
(4) Bendahara Pengeluaran	:	2%

- | | | |
|--------------------------------|---|----|
| (5) Pengelola Sarana Prasarana | : | 1% |
| f) Pcare | : | 2% |
- b. Operasional sebesar 20% (dua puluh persen).
3. Jasa transportasi rujukan, mengacu pada standarisasi rujukan yang ditetapkan oleh Bupati Tanah Laut
- a. Jasa layanan kesehatan sebesar 80% (delapan puluh persen)
- | | | |
|--------------------------------|---|-----|
| a) Sopir | : | 25% |
| b) Pendamping rujukan | : | 30% |
| c) Dokter | : | 10% |
| d) Tim BLUD | : | 13% |
| (a) Pimpinan BLUD | : | 4% |
| (b) Pejabat Keuangan | : | 3% |
| (c) Bendahara Penerimaan | : | 2% |
| (d) Bendahara Pengeluaran | : | 2% |
| (e) Pengelola Sarana Prasarana | : | 2% |
| e) P-care | : | 2% |
- b. Operasional sebesar 20% (dua puluh persen)

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 38 TAHUN 2023
TANGGAL : 20 MARET 2023

RINCIAN PERHITUNGAN PEMANFAATAN DANA
PELAYANAN SESUAI TARIF PELAYANAN KESEHATAN BLUD

Rincian Pemanfaatan dana pelayanan sesuai tarif pelayanan kesehatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 adalah sebagai berikut:

- 1. Pelayanan Persalinan.
 - a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 80% (Delapan puluh persen)
 - a) Bidan Pelaksana Pelayanan : 78%
 - b) Dokter Penanggung Jawab : 4%
 - c) Penanggung jawab Kesga : 2 %
 - d) Non Medis dan Non Perawatan : 4%
 - (1) Loker : 1%
 - (2) Farmasi : 1%
 - (3) CS : 1%
 - (4) Laboratorium : 1%
 - e) Tim BLUD : 12%
 - (1) Pimpinan BLUD : 4%
 - (2) Pejabat Keuangan : 3%
 - (3) Bendahara Penerimaan : 2%
 - (4) Bendahara Pengeluaran : 2%
 - (5) Pengelola Sarana Prasarana : 1%
 - b. Operasional sebesar 20% (dua puluh persen).
- 2. Pelayanan Rawat Inap
 - a. Jasa layanan kesehatan sebesar 80% (delapan puluh persen)
 - a) Perawat Pelaksana Pelayanan : 55%
 - b) Dokter Penanggung Jawab : 21%
 - c) Penanggung Jawab Rawat Inap : 4 %
 - d) Non Medis dan Non Perawatan : 6%
 - (1)Loker : 1%
 - (2)Farmasi : 1%
 - (3)CS : 1%
 - (4)Laboratorium : 1%
 - (5)Administrasi : 2%
 - e) Tim BLUD : 14%
 - (1) Pimpinan BLUD : 5%
 - (2) Pejabat Keuangan : 4%
 - (3) Bendahara Penerimaan : 2%
 - (4) Bendahara Pengeluaran : 2%
 - (5) Pengelola Sarana Prasarana : 1%
 - b. Operasional sebesar 20% (dua puluh persen)
- 3. Jasa transportasi rujukan, mengacu pada standarisasi rujukan yang ditetapkan oleh Bupati Tanah Laut.

- a. Jasa layanan kesehatan sebesar 80% (delapan puluh persen)
 - a) Sopir : 25%
 - b) Pendamping rujukan : 32%
 - c) Dokter : 10%
 - d) Tim BLUD : 13%
 - (1) Pimpinan BLUD : 4%
 - (2) Pejabat Keuangan : 3%
 - (3) Bendahara Penerimaan : 2%
 - (4) Bendahara Pengeluaran : 2%
 - (5) Pengelola Sarana Prasarana : 2%
- b. Operasional sebesar 20% (dua puluh persen)

- 4. Pelayanan Tim Kesehatan (P3K)
 - a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 80% (Delapan puluh persen)
 - a) Pelaksana Pelayanan : 87%
 - b) Tim BLUD : 13%
 - (1) Pimpinan BLUD : 4%
 - (2) Pejabat Keuangan : 3%
 - (3) Bendahara Penerimaan : 2%
 - (4) Bendahara Pengeluaran : 2%
 - (5) Pengelola Sarana Prasarana : 2%
 - b. Operasional sebesar 20% (dua puluh persen).

- 5. Pelayanan Kesehatan lainnya
 - a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 70% (Tujuh puluh persen)

Persentase Kehadiran

x

Jenis Ketenagaan

+

Masa Kerja

+

Rangkap Tugas Administrasi

+

Tanggung jawab program

}

x

Jumlah Dana Jaspel

Total Jumlah Seluruh Poin

- b. Operasional sebesar 30% (tiga puluh persen).

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA